No. 08 TAHUN KE - 72, AGUSTUS 2025

ISSN: 1411 - 8505

# ROHANI

Menjadi Semakin Insani

Rp20.000,00 (Luar Jawa Rp22.000,00)
Belum termasuk ongkos kirim.

## Iman Katolik dan Kebangsaan

Tuhan Yesus Bekerja: Kesaksian Iman Seorang Perwira Polri | Claret dan *Latihan Rohani*
Apa Kata Alkitab tentang Hormat pada Negara? | Religius Merayakan Pesta HUT RI

# Apa Kata Alkitab tentang Hormat pada Negara?

Ada sebagian orang yang menganggap bahwa negara adalah perwujudan kuasa jahat yang bertentangan dengan Allah. Mereka menolak memberi hormat pada pejabat dan simbol-simbol negara. Ketika mengikuti upacara bendera, misalnya, mereka tidak mau menghormati bendera kebangsaan. "Bukankah kita harus menyembah Tuhan saja? Memberi penghormatan pada bendera sama dengan menyembah berhala," demikian pendapat mereka. Benarkah demikian?

**BOBBY STEVEN, MSF** | Dosen Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma

GEREJA Katolik memiliki tradisi panjang dalam mengajarkan ketaatan pada otoritas yang sah, dengan beberapa dokumen penting. Pertama, Ensiklik *Diuturnum Illud* (Paus Leo XIII, 1881) menegaskan bahwa otoritas politik berasal dari Allah dan harus dihormati selama tidak melawan hukum moral. Kedua, Ensiklik *Immortale Dei* (Paus Leo XIII, 1885) menjelaskan hubungan antara Gereja dan negara, serta kewajiban warga Katolik untuk taat pada pemerintah yang sah.

Selanjutnya, Gereja Katolik dalam *Gaudium et Spes* (1965) art. 74 mengakui bahwa otoritas politik diperlukan untuk kebaikan bersama dan harus dihormati selama mengejar keadilan. *Katekismus Gereja Katolik* (KGK 1897-1904, 2238-2243) menegaskan, warga negara harus menaati otoritas yang sah, kecuali jika bertentangan dengan hati nurani yang dibentuk oleh iman.

Akar penghormatan Gereja Katolik terhadap negara bersumber dari Alkitab dan diajarkan secara konsisten oleh Magisterium Gereja. Ketaatan pada pemerintah yang sah adalah bentuk pengakuan akan rencana Allah bagi tatanan dunia, selama otoritas tersebut tidak bertentangan dengan hukum ilahi.

Hormat terhadap negara dan pemerintah yang sah memiliki dasar yang kuat dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian

Baru. Ajaran ini berkembang dalam tradisi Katolik dan dipertegas oleh dokumen-dokumen Gereja.

**Dasar dari Perjanjian Lama**

Dalam Pentateukh atau Lima Kitab Musa, Allah menetapkan tatanan sosial dan politik sebagai bagian dari rencana ilahi. Pemerintah dianggap sebagai sarana untuk menjaga keadilan dan ketertiban.

Keluaran 22:28 menegaskan, "Janganlah engkau mengutuk Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemimpin di antara bangsamu." Ayat ini menunjukkan larangan menghina pemimpin, karena mereka dipandang sebagai wakil otoritas yang ditetapkan Allah.

Kitab Bilangan 17:14-20 memuat aturan tentang pemilihan raja. Allah mengizinkan Israel memiliki raja, tetapi raja harus tunduk pada hukum Allah. Ini menunjukkan bahwa otoritas politik sah asalkan sesuai dengan kehendak ilahi.

Dalam Sastra Kebijaksanaan, ditekankan bahwa pemerintah yang adil adalah anugerah dari Tuhan. Amsal 8:15-16 menyatakan, "Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa, dan para bangsawan menghakimi bumi." Sementara itu, Kebijaksanaan Salomo 6:1-11 memuat peringatan bagi para raja untuk memerintah dengan adil karena mereka akan diadili oleh Tuhan.

Kitab Nabi-nabi mengakui bahwa pemerintahan yang sah berasal dari Allah. Yeremia 29:7 menegaskan, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Daniel 2:21 menegaskan kedaulatan Allah atas sejarah termasuk pengangkatan dan penurunan penguasa. "Dia mengubah saat dan waktu, memecat raja dan mengangkat raja."

**Dasar dari Perjanjian Baru**

Yesus sendiri mengajarkan sikap hormat pada kuasa sipil yang menjamin keteraturan dalam hidup bermasyarakat. Yesus mengajarkan ketaatan pada otoritas sipil selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah" (Mat. 22:21).

Yesus mengakui otoritas negara yang sah, tetapi menegaskan bahwa ketaatan tertinggi adalah kepada Allah. Dalam dialog dengan Pilatus, Yesus menegaskan, "Engkau tidak mempunyai kuasa apa pun terhadap Aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas" (Yoh. 19:11).

Dalam 1 Timotius 2:1-2, Paulus berpesan, "Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar." Paulus menegaskan bahwa pemerintah adalah "hamba Allah" untuk menegakkan keadilan. "Setiap orang harus takluk kepada pemerintah





yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah" (Rm. 13:1-7). Paulus mengajarkan bahwa otoritas sipil berasal dari Allah dan menentangnya berarti menentang ketetapan ilahi, selama pemerintah bertindak adil.

Paulus ingin memberi pengajaran iman pada jemaat di Roma, pusat Kekaisaran Romawi, yang belum pernah ia kunjungi. Karena itu, ia memperkenalkan diri pada jemaat di Roma (Rm. 1:1-17). Saat Paulus menulis suratnya sekitar tahun 57 M, penganiayaan massal pada orang Kristen belum dilancarkan oleh Kekaisaran Roma. Penganiayaan besar-besaran baru akan terjadi pada tahun 64 M, saat Kaisar Nero mengambinghitamkan orang Kristiani atas kebakaran hebat di Roma.

**Menaati dengan Suara Hati**

Paulus pasti tahu peran Pontius Pilatus, kaki-tangan Roma, dalam menyerahkan Yesus untuk disalibkan (Mat. 27:11-26). Meski demikian, Paulus dalam suratnya pada jemaat di Roma tidak menunjukkan dendam atau kebencian pada pihak penguasa, termasuk Kekaisaran Roma. Paulus tidak ingin jemaat di Roma menjadi pemberontak yang menempuh jalan kekerasan.

Ajaran Paulus dalam perikop ini harus dipahami dalam latar belakang Perjanjian Lama. Bangsa Israel telah dididik, terutama selama masa pembuangan di Babel, untuk menghormati penguasa. "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu" (Yer. 29:7). Selain itu, Nabi Barukh memberi nasihat, "Hendaklah mendoakan kesejahteraan Nebukadnezar, raja Babel" (Bar. 1:11).

Paulus berpesan, "Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah, yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah yang ada, ditetapkan oleh Allah… Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Karena itu, perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita" (Rm. 13:1.4-5).

Paulus tidak mengatakan bahwa kita harus *selalu* tunduk secara buta pada pemerintah. Paulus menegaskan bahwa pengikut Kristus "menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh *suara hati*" (Rm. 13:5). Suara hati kitalah yang menilai apakah perintah penguasa sejalan atau bertentangan dengan kehendak Allah. Pemerintah duniawi yang jelas-jelas melawan kehendak Allah tidak perlu ditaati pengikut Kristus.

Apa yang disampaikan Paulus senada dengan pendapat Petrus.

Menurut Petrus, tujuan pemerintahan adalah untuk kesejahteraan umum. "Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik ... Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja!" (1 Ptr. 2:13-14, 17).

Petrus dan Paulus sama-sama memandang kekuasaan duniawi bermanfaat sebagai penjamin keadilan di dunia ini. Pemerintahlah yang di dunia ini bertugas menghukum orang jahat dan memberi penghargaan pada orang baik. Sikap takwa pada Allah tidak bertentangan dengan sikap hormat pada pemerintahan yang baik.

Paulus mengingatkan kewajiban kita pada negara, "Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai; rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat" (Rm. 13:6-7).

Sebagai pengikut Kristus, kita wajib menghormati aparatur, hukum, dan simbol-simbol negara yang sah. Penghormatan pada pemerintah yang sah amat diperlukan karena tanpa adanya dukungan dari segenap warga negara, mustahil pemerintah dapat menjamin kepastian hukum. Sepanjang hukum nasional sudah menjamin keadilan, orang Katolik tidak perlu memperjuangkan pemberlakuan hukum khusus, seperti misalnya "perda Injil" di daerah mayoritas Kristiani.

**Mencintai dengan Sederhana**

Masih banyak tindakan lain yang bisa kita buat untuk menunjukkan hormat dan cinta kita pada pemerintahan yang sah. Kita bisa memulai dengan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungan terdekat, misalnya RT dan RW, dengan ikut kerja bakti. Mencintai negara bisa diwujudkan dengan tindakan sederhana namun nyata.

Jumlah umat Katolik di Indonesia tidak banyak. Mengharapkan seorang Katolik menjadi presiden atau wapres di negeri ini rasanya masih jadi mimpi di siang bolong. Akan tetapi, ada peluang bagi orang Katolik untuk jadi pengurus masyarakat di tingkat akar rumput, misalnya menjadi ketua RT/RW, pengurus PKK, dan Karang Taruna. Kesediaan kita untuk menjadi pengurus menjadi kontribusi positif dalam kehidupan bernegara. Mari kita baktikan diri dengan semangat Yesus, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. ◆